



### Dari Redaksi

"Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa". (QS 4: 149)  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh,

Hiruk pikuk pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan pada semester pertama tahun 2014 telah selesai. Selanjutnya pada semester II tahun 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh akan melaksanakan dua pemeriksaan tematik dari BPK Pusat berupa pemeriksaan kinerja penyediaan air bersih dan PDDT atas pelaksanaan anggaran pemilu pada KPU. Selain itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan pemeriksaan operasional Bank Aceh.

Tema utama yang diambil untuk Buletin Serambi edisi ini adalah pemeriksaan kinerja atas penyediaan air bersih. BPK sebagai badan publik yang memegang amanat rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melaksanakan pemeriksaan atas kinerja penyediaan air bersih untuk menjawab dua pertanyaan besar yaitu apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait penyediaan air bersih? dan Bagaimana BPPSPAM melakukan penilaian atas kinerja PDAM? Diharapkan dengan dilaksanakannya pemeriksaan ini akan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam program penyediaan air bersih kepada masyarakat.

Akhirnya, setelah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan, Tim Redaksi mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah". Marilah di hari kemenangan ini kita saling maaf-memaafkan satu sama lain, atas segala kesalahan dan kekhilafan kita. Dengan adanya saling memaafkan antar sesama akan membuka lembaran baru dalam kehidupan bermasyarakat kita dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Minal Aidin Wal'faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.  
Wabillahi Taufiq Wal' Hidayah  
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

#Tim Redaksi

### Berita Utama

## Bekerja Keras, Cerdas dan Ikhlas untuk Meningkatkan Kinerja BPK

oleh: Nur Miftahul Lail

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23 E, tugas BPK RI adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan tugas tersebut dalam kerangka untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pendirian BPK bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan mandat tersebut, BPK melaksanakan tugas dengan melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan

dengan tujuan tertentu. Seluruh pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut, BPK memiliki visi sebagaimana tercantum dalam rencana strategis BPK Tahun 2011 - 2015 yaitu menjadi lembaga pemeriksa yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Lembaga yang kredibel tersebut diukur dengan kualitas kerja kita yang *zero defect, zero distortion*, dan dapat diuji atau dipertanggungjawabkan secara profesional.

Untuk menjaga kredibilitas itu, tidak saja kita memperbaiki kualitas internal kita, tetapi kita harus peka terhadap perubahan lingkungan, termasuk *knowing your auditee*. Adanya perubahan zaman dan tuntutan *stakeholders* telah menyebabkan perubahan di segala bidang termasuk bidang keuangan negara. Lembaga yang tidak bermetamorfosis mengikuti perkembangan lingkungan akan tertinggal dan tergilas dengan sendirinya.

BPK adalah lembaga negara yang hingga saat ini terus memperbaiki diri mengikuti gerak dan tuntutan lingkungan. BPK terus berupaya untuk memberikan sumbangan kinerja terbaik dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia

Perkembangan jumlah entitas pengelola keuangan negara dari tahun ke tahun menuntut BPK bekerja lebih cerdas, lebih keras, lebih efektif dan efisien, serta ikhlas. Oleh karena itu mari jadikan Bulan suci Ramadhan 1435 H sebagai momentum langkah besar



kita untuk perubahan. Perubahan-perubahan ini sangatlah diperlukan bagi kita, apalagi perubahan-perubahan yang menyangkut akhlak, ibadah, dan ketakwaannya kita kepada Allah. Selain yang menyangkut akhlak dan hubungan vertikal dengan Sang Khaliq, perubahan penting lainnya adalah perilaku kita

dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam peningkatan perilaku dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari.

Pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari di kantor juga merupakan ibadah, jika kita meniatkannya dengan ikhlas, dengan tujuan mendapat kebaikan dan rahmat Allah. Ibadah puasa yang kita lakukan hendaknya tidak menjadikan penurunan kinerja, tetapi menjadikan semangat tambahan bahwa pekerjaan yang kita lakukan akan mendapat pahala yang berlipat ganda, karena kita menjalankan puasa dan kewajiban pekerjaan dengan keikhlasan dan semangat yang seimbang.

Bersambung ke halaman 2 ....



Sambungan dari halaman 1 ...

Dengan adanya persepsi yang sama bahwa pekerjaan di kantor juga adalah ibadah, maka akan melekat dengan sendirinya bahwa kita seharusnya sudah dapat melaksanakan dan menikmati untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Sehingga akhirnya BPK bisa bekerja lebih cerdas, lebih keras, lebih efektif dan efisien, serta ikhlas.

Dengan modal kerja keras, cerdas dan ikhlas akan mendorong BPK untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas, tidak hanya memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan, tetapi juga harus menilai aspek pengelolaan keuangan negara dari segi ekonomi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, selain meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan, kita juga harus mengembangkan kapasitas dan kualitas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Seluruh pemeriksaan BPK tersebut untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).

Dengan modal bekerja keras, cerdas dan ikhlas ini diharapkan akan melekat komitmen tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan BPK yang menjunjung tinggi Independensi, Integritas dan Profesionalisme (IIP). Selanjutnya dengan IIP, Insya Allah BPK akan mampu memberi kontribusi positif dalam upaya mencapai tujuan bernegara yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Melalui Bulan Suci Ramadhan 1435 H, semoga ibadah puasa yang telah kita jalankan mampu memberikan efek positif buat kita semua, menjadikan kita insan yang kian bertaqwa, dan menjadi insan yang kian berkualitas. Akhirnya, seiring datangnya 1 Syawal 1435 H, BPK RI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri yang telah kita rayakan, mampu menjadikan kita insan-insan yang lebih bersih dan lebih cemerlang, baik lahir dan batin

## Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pemeriksaan (PKPP)

oleh: Dhani Adrian

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pemeriksaan (PKPP) adalah penilaian berbasis sasaran kerja dan kompetensi yang diberikan kepada pegawai atas penugasan pelaksanaan pemeriksaan. Kewajiban mengimplementasikan PKPP merupakan tindak lanjut dari harmonisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang disesuaikan dengan aktivitas para pemeriksa di lingkungan BPK. Asumsi bahwa tugas utama para pemeriksa adalah sebagian besar waktunya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, maka sudah sepatutnya kinerja mereka harus dapat diukur dengan pendekatan spesifik terkait kegiatan pemeriksaan.

Kenapa harus menginput PKPP? Apa manfaatnya bagi pemeriksa? Jika tidak mengimplementasikan PKPP, mengapa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat ingin dilontarkan para pemeriksa ke Subbagian SDM.

Untuk menghindari asumsi bahwa PKPP merupakan kegiatan formalitas yang dapat diakali untuk kepentingan sesama yang dapat menguntungkan para pemeriksa, maka dibuat standarisasi aspek penilaian kinerja pemeriksian yang diatur dengan keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 139/K/X-XIII.2/4/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Setiap pemeriksa, sesuai dengan perannya di dalam Tim Pemeriksa dinilai dengan pendekatan berbeda, yaitu peran sebagai Pengendali Teknis, Ketua Tim, Ketua Sub Tim, dan Anggota Tim. Tujuannya agar setiap pemeriksa dapat termotivasi melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab, karena akan diukur kinerjanya berdasarkan standar dan berlaku bagi semua pemeriksa. Penilaian tersebut juga akan dikritisi bawahan yang dinilai apabila tidak sesuai dengan prestasi senyatanya yang ditunjukkan pada saat penugasan.

Disisi lain pemeriksa penilai juga akan dinilai oleh pemeriksa satu tingkat hirarkhi di atasnya, yang menuntut kualitas pekerjaan yang sesuai dengan harapan penugasan. Hal tersebut akan menimbulkan keseimbangan penilaian antara pemberi nilai dan yang dinilai. Esensi dari seorang pemeriksa telah dinilai kinerjanya, hanya dapat dilakukan apabila semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai tim mandiri telah selesai dilaksanakan.

Lalu bagaimana dengan pemeriksa yang tidak mengimplementasikan PKPP? Apakah dapat menghindar dengan alasan tidak sempat mengerjakan? Keputusan Sekjen BPK No. 139/K/X-XIII.2/4/2014, menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksa tidak mengimplementasikan PKPP, pimpinan unit kerja setingkat Eselon II meminta Atasan Langsung dari Pemeriksa yang bersangkutan untuk melakukan pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, dengan melihat respon implementasi PKPP yang masih rendah pada periode triwulan I dan triwulan II tahun 2014, Subbagian SDM dengan sangat terpaksa akan menerapkan metode sanksi yang sejalan dengan SK Sekjen, yaitu tidak akan melayani pengurusan hal-hal terkait dengan urusan kepegawaiannya apabila para pemeriksa bersangkutan tidak melaksanakan implementasi PKPP-nya masing-masing. Semoga dengan kesadaran menyelesaikan PKPP secara tepat waktu, mendorong setiap pemeriksa bekerja lebih disiplin dengan tugas dan tanggung jawabnya. Semoga. (SDM)



## Kabar Aceh

Waspada, Rabu/18 Juni 2014

### Dana Hibah 851,5 M Belum Dipertanggungjawabkan

Hasil Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, ditemukan sejumlah permasalahan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh TA 2013, salah satunya BPK menemukan beberapa temuan terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang, temuan itu diantaranya penyaluran dana hibah sebesar 851,5 miliar yang belum dipertanggungjawabkan dan penerimanya juga tidak sesuai ketentuan.

Serambi, Rabu/18 Juni 2014

### Kejari Langsa Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Pembangunan Ruang Sidang DPRK

Setelah sekian lama melakukan pemeriksaan, akhirnya Kejaksaaan Negeri Kota Langsa melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pembangunan ruang sidang DPRK Kota Langsa ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Banda Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh diduga kerugian negara sebesar 155 juta Rupiah. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini membuktikan bahwa Kejari Langsa tidak main-main dalam memberantas korupsi dan dugaan serta asumsi masyarakat yang menilai bahwa kasus dugaan korupsi itu tidak ditindaklanjuti terjawab sudah.

Modus, Senin/21 Juli 2014

### Proyek 'Simsalabim' Ruang VIP Bandara SIM.

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh menemukan proyek Dishubkomintel Aceh tahun 2013 sarat penyimpangan. Diduga, beberapa item proyek Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) itu tidak sesuai spesifikasi, ada pula yang tak selesai tepat waktu tanpa denda, hingga sama sekali tak dikerjakan, celakanya lagi realisasi keuangan justru dibayar seratus persen.

## Optimalisasi Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kinerja PDAM

oleh : Muhammad Reza Aryanto

Berdasarkan target MDG (*Millenium Development Goal*) di bidang air minum yaitu "penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2015, (*UN Millenium Declaration, 2000*)", artinya Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan rasio rumah tangga yang memiliki akses yang aman dan berkelanjutan terhadap air minum sebesar dua kali lipat dari acuan rasio sebesar 37,73% (1993) sehingga menjadi 68,87% pada tahun 2015. Sampai dengan 2011, penduduk Indonesia yang mengakses air minum melalui sistem perpipaan masih sangat kecil proporsinya, yaitu sebesar 51,7% di perkotaan dan sebesar 5,4% di pedesaan, sedangkan penduduk Indonesia yang dapat mengakses sumber air terlindungi kurang lebih sebesar 43% ([indonesiamdgs.org](http://indonesiamdgs.org)). Hal tersebut menunjukkan bahwa target MDG di bidang air minum masih jauh dari sasaran, sementara itu 2015 sudah di depan mata.



Sistem penyediaan air minum melalui perpipaan saat ini sebagian besar dilaksanakan oleh BUMD, dalam hal ini PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM merupakan lembaga yang berhak untuk melaksanakan usaha penyediaan air di suatu daerah, sesuai dengan PP No. 16 tahun 2005 Pasal 37 ayat (2).

Meskipun hanya di beberapa daerah, Pemerintah Pusat melalui Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) telah mendorong Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) demi mempercepat laju pemenuhan target MDG, khususnya target pada bidang air minum.

Salah satu peran penting Pemerintah Daerah adalah penentuan kebijakan tarif air minum. Penetapan tarif air minum sebaiknya ditetapkan sejalan dengan visi PDAM itu sendiri. Jika PDAM dituntut untuk meraih laba, maka sebaiknya tarif yang ditetapkan di atas Harga Pokok Produksi (HPP). Sementara itu, jika PDAM dituntut untuk melayani masyarakat dengan tarif rendah, Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi untuk menutup selisih antara HPP dengan pendapatan PDAM. Hal tersebut demi menjaga kinerja PDAM tetap baik dan dapat terus tumbuh.

Peran Pemerintah Daerah lainnya adalah pemberian modal kepada PDAM baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk infrastruktur. Kemudian, Pemerintah Daerah dapat berperan menjaga ketersediaan air baku. Dalam hal ini diperlukan kordinasi antara pengelola sistem penyediaan air, dinas terkait dan elemen pemerintahan.

bersambung ke halaman 4 ...

## Pemeriksaan Infrastruktur Jalan

oleh : Andriansyah

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana melalui pembangunan infrastruktur merupakan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu sebagian besar APBN maupun APBD dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur. Statistik menunjukkan adanya alokasi anggaran yang signifikan dan meningkat dari tahun ketahun dalam belanja Pemerintah di sektor infrastruktur. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi belanja infrastruktur dari tahun 2005 sampai dengan 2011 sebagai berikut:

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Realisasi Belanja Infrastruktur	23,7	50,0	54,0	71,0	78,9	82,6	123,8

Dengan demikian sangatlah penting bagi pemeriksa untuk memastikan apakah belanja infrastruktur tersebut telah dilaksanakan dengan cara-cara yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan berikut ini akan memberikan pengenalan singkat mengenai teknik pemeriksaan infrastruktur yang sering ditemui yaitu infrastruktur jalan.

Pekerjaan pembangunan jalan ataupun rehabilitasi jalan terdiri dari beberapa major item (pekerjaan utama) yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Salah satu yang paling sering ditemui yaitu pekerjaan perkerasan beraspal (AC, ATB, HRS, ACBC, ACWC).

Adapun langkah pemeriksaan atas pekerjaan perkerasan yang bersifat *flexible pavement* (perkerasan lentur) ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui *volume* terpasang dilakukan dengan cara pengukuran atas dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tebal. Pengukuran panjang dan lebar dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukur meter. Khusus untuk pengukuran ketebalan harus dilakukan dengan alat bor inti (*core drill*).
2. Apabila hasil pengukuran (*core drill*) diketahui ketebalan aspal lebih dari ketebalan desain, maka volume aspal yang diakui dan yang harus dibayarkan, dihitung berdasarkan tebal desain/spesifikasi dan dikalikan luas pekerjaan aspal.
3. Apabila hasil pengukuran ketebalan lebih kecil dari ketebalan desain namun masih dalam batas toleransi (lihat tabel), maka volume aspal yang diakui dan dibayarkan adalah dihitung dari luas dikalikan ketebalan aspal hasil *core drill*.
4. Apabila hasil pengukuran ketebalan lebih kecil dari ketebalan desain dan selisihnya melebihi batas toleransi, maka pekerjaan aspal tidak diperkenankan dibayar seluruhnya (*total lost*).
5. Berikut tabel nominal rancangan campuran aspal dan toleransinya, berdasarkan Spesifikasi Umum Ditjen Bina Marga No. 008-1/BM/2010

Jenis Campuran	Simbol	Tebal Nominal Minimum (cm)	Toleransi Tebal (mm)
Latasir Klas A	SS-A	1.5	2.0
Latasir Klas B	SS-B	2.0	
Lataston	Lapis Aus	HRS-WC	3.0
	Lapis Pondasi	HRS-Base	3.5
Laston	Lapis Aus	AC-WC	4.0
	Lapis Antara	AC-BC	6.0
	Lapis Pondasi	AC-Base	7.5

6. Selain hal tersebut di atas jumlah sampel untuk uji *core drill* juga harus diperhatikan agar pengujian dengan menggunakan teknik uji *core drill* dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah sampel yang akan diuji dan jarak antar titik uji dapat menggunakan SNI 03-6868-2002 tentang tata cara pengambilan contoh uji secara acak untuk bahan konstruksi dengan rumus:

$$n = \sqrt[3]{V}$$

dimana:

n = jumlah contoh uji

V = satuan panjang

Sumber: Disarikan dari Diklat Infrastruktur dan Buku "Auditing Proyek-Proyek Konstruksi" oleh Hendra Susanto dan Hediana Makmur

Sambungan hal 3 ...

Keseluruhan peran serta Pemerintah tersebut harus sejalan dengan target MDG untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang hanya dapat tercipta jika kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyelenggaraan SPAM sudah dapat dipenuhi oleh penyelenggara, dalam hal ini PDAM. Jika kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyelenggaraan SPAM sudah dapat dipenuhi, maka secara logis kinerja PDAM tersebut akan meningkat.

Optimalisasi peran serta Pemerintah Pusat melalui BPPSPAM maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja PDAM dari berbagai macam aspek indikator kinerja. Dari empat aspek indikator yang digunakan oleh BPPSPAM dalam mengukur kinerja PDAM (Aspek Keuangan, Pelayanan, Operasional dan Sumber Daya Manusia). Dengan adanya optimalisasi peran serta tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja atas aspek indikator keuangan, pelayanan dan operasional.

Selayaknya Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah memperhatikan dan mengusahakan SPAM melalui koordinasi yang baik, peran serta yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

## Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

oleh: Johny Indra Kencana

Tahun 2014 adalah tahun politik dimana Bangsa ini menyelenggarakan hajat politik yang sangat besar yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan untuk memilih presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu tahun 2014, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp8.485.960.460.000 dan s.d. Juni 2014 KPU (baik pusat maupun daerah) telah merealisasikan dana tersebut sebesar Rp5.904.151.828.160.

Berkaca dari Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu tahun 2004 dan 2009 yang menyeret beberapa komisioner serta pejabat KPU, seperti kasus pengadaan TI (Teknologi Informasi) pada Pemilu Tahun 2009, penyuapan yang dilakukan oleh pejabat KPU,

Selain itu, pemeriksaan tersebut dilakukan agar terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Penjelasan pasal 8 ayat (4) huruf d yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran yang diterima KPU/KIP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menilai apakah:

- Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
- Pelaksanaan anggaran Pemilu telah sesuai ketentuan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan pemeriksaan dengan lingkup pemeriksaan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran pemilu tahun 2013 dan 2014. Sedangkan sasaran pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan difokuskan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2013 dan 2014; dan
- Pemeriksaan atas kegiatan pengadaan barang/jasa, pembayaran honorarium, perjalanan dinas, penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah, dan Kas pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU/KIP Provinsi, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang menjadi *sample* pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran pemilihan umum pada KPU yaitu Komite Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, KIP Kabupaten Aceh Barat, KIP Kabupaten Aceh Tengah, KIP Kabupaten Aceh Barat, dan KIP Kabupaten Nagan Raya. Rincian anggaran dan realisasi dana pada *sample* tersebut adalah sebagai berikut:



pengadaan jasa asuransi Pemilu 2004 dan pengumpulan dana taktis di KPU, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Independen Pemilihan (KIP)/Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan untuk mendeteksi terulangnya kejadian-kejadian tersebut.

No.	Satker	2013		2014	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi (Smt. I)
1	KIP Provinsi Aceh	20,361,323,000	15,185,471,993	21,121,023,000	7,412,043,445
2	KIP Kabupaten Aceh Besar	26,661,567,000	21,779,288,846	37,470,663,000	14,542,943,286
3	KIP Kabupaten Aceh Tengah	17,300,492,000	12,107,027,931	24,252,390,000	9,465,029,795
4	KIP Kabupaten Aceh Barat	16,047,258,000	13,168,288,352	23,670,085,000	8,700,794,595
5	KIP Kabupaten Nagan Raya	12,540,970,000	11,336,852,594	18,742,126,000	6,946,925,735
<b>Total</b>		<b>92,911,610,000</b>	<b>73,576,929,716</b>	<b>126,266,287,000</b>	<b>47,067,736,856</b>

### Pengumuman Pemenang Quiz Buletin Serambi Edisi 1 Tahun 2014

- Agus Padli (Security)
- Mirza (Security)

Selamat kepada para pemenang, hadiah dapat diambil di Sub Bagian Hukum dan Humas

2	7	6	3	8	4	1	9	5
8	4	3	5	1	9	6	2	7
5	1	9	7	6	2	8	4	3
6	9	2	8	5	3	4	7	1
7	3	4	1	9	6	2	5	8
1	5	8	4	2	7	9	3	6
4	2	7	6	3	8	5	1	9
9	6	1	2	7	5	3	8	4
3	8	5	9	4	1	7	6	2

Jawaban Quiz Buletin Serambi edisi 1

### Tim Redaksi

- Pengarah ..... "Maman Abdurachman"  
 Penanggung Jawab ..... "Nur Miftahul Lail"  
 Ketua ..... "Eva Siregar"  
 Sekretaris ..... "Putri Fitri"  
 Anggota ..... "Zeno Alea Alex Sander, Eko Nugroho, Joko Istanto, Radiansyah, Eddy Sahrum"



# BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Dalam Berita

Kamis, 17 April 2014

“Ekspose Kejati”

17/04

Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang diwakili oleh Ali Akbar, Rahmadiyahus, Iqbal dan Ibnu Sak melakukan ekspose lanjutan (pemaparan kasus) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Kasus yang dipaparkan adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya (17 Februari 2014) yaitu terkait dugaan penyimpangan/penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tenggara TA



2010 dalam bentuk Kas Bon. Tim Kejati Aceh diterima oleh Kepala Sub Auditorat Aceh I, Syafruddin Lubis, Kepala Sub Auditorat Aceh III, Ari Endarto, dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Eva Siregar. Dalam pertemuan lanjutan ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh mendapatkan penjelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi Aceh terkait beberapa data terbaru yang telah diperoleh oleh Pihak Kejati. Kegiatan koordinasi itu dilakukan dalam rangka tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK.

Selasa, 6 Mei 2014

“BPK Goes to School”

06/05

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan acara *BPK Goes to School* ke SMK Negeri 1 Banda Aceh. Acara yang dihelat di aula SMK Negeri 1 Banda Aceh ini dihadiri sekitar 150 orang yang terdiri dari siswa/i dan guru SMK Negeri 1 Banda Aceh beserta tamu undangan. Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, Syaridin, S.Pd., M.Pd. Dalam kesempatan tersebut, bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Maman Abdulrachman, S.E., M.M. dengan moderator Kepala Sekretariat Perwakilan, Nur Miftahul Lail, S.E., Ak., didampingi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banda Aceh, Salma, S.Pd. Materi yang dipaparkan terkait dengan ke-BPK-an, antara lain tentang tugas, fungsi dan wewenang BPK. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, Maman Abdulrachman, S.E., M.M. berharap melalui acara ini, para siswa/i, guru dan tamu undangan lainnya dapat mengenal lebih dekat BPK, sehingga bersama-sama dapat bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut senada dengan tema yang diusung pada *BPK Goes to School* kali ini yaitu:



“Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara”.

Rabu, 14 Mei 2014

“Media Workshop”

14/05

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh mengadakan *media workshop* dengan para insan media yang ada di seluruh Banda Aceh. Acara ini dilaksanakan di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengangkat tema “Sinergi BPK RI dan Insan Media Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Melalui *media workshop* ini, diharapkan akan semakin meningkatkan sinergi antara BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh dengan para insan media dalam kerangka pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Materi bahasan dalam acara ini terkait *progress* Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2013.



Selasa, 20 Mei 2014

“Hari Kebangkitan Nasional”

20/05

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-106 yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Nur Miftahul Lail dan diikuti oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh.



Dalam Sambutannya Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh membacakan pidato dari Menteri Komunikasi dan Informasi tentang bagaimana Bangsa Indonesia memaknai “kebangkitan nasional”. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita haruslah bisa memberikan kemajuan yang lebih baik dan menunjukkannya kepada bangsa lain. Dengan begitu, barulah kita bisa menjadi bangsa yang memiliki harkat dan martabat. Semoga, momentum Kebangkitan Nasional di tahun ini dapat menjadi pemicu semangat kita untuk berubah menjadi lebih baik dari masa lalu.

Senin, 16 Juni 2014

“LHP Pemerintah Aceh”

16/06

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPD) TA 2013. Penyerahan LHP atas Pemerintah Aceh ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Gedung DPRA Provinsi Aceh. Penyerahan LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Maman Abdulrachman, kepada Ketua DPRA, Hasbi Abdullah dan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Berdasarkan pemeriksaan yang ditakukan BPK, opini yang diberikan adalah “Wajar Dengan Pengecualian” atau “*Qualified Opinion*”.





## Wisata Aceh Tengah, Indahnnya Negeri di atas Awan

Cobalah anda datang ke Takengon dan nikmati Danau Laut Tawar. Dengan 4 hari di daerah ini, anda akan menikmati gabungan antara wisata bersepeda, renungan masa lalu, masa depan, dan masa kini. Di sini, Anda akan menikmati keindahan negeri di atas awan dan berwisata kuliner di daerah penghasil kopi nikmat. Alamnya sangat indah dan berbeda dengan tempat wisata sejenis baik di Indonesia maupun tempat lain di dunia ini.

Takengon adalah ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Kawasan ini merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk dan memiliki beragam tempat wisata indah di antaranya adalah Danau Laut Tawar, Puteri Pukes dan Pantan Terong. Kota Takengon terletak berdekatan dengan Kabupaten Bener Meriah dan berjarak sekitar 100 km dari Kota Bireun.



Keindahan Danau Laut Tawar

Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh. Takengon merupakan tujuan wisata yang berada di dataran tinggi Gayo. Keindahan alamnya seolah tersembunyi karena di kelilingi oleh gunung-gunung. Banyak pengunjung seolah tidak ingin pulang lagi setelah mengunjungi wilayah indah ini karena tempatnya sejuk, nyaman, aman dan masyarakatnya yang ramah.

Ketika anda menjelajah jalan berkelok-kelok di samping keretakan indah Gunung Geureundong dalam perjalanan ke Takengon, sebuah kota kecil dengan penduduk tidak lebih dari 230.000 di Aceh Tengah, mata anda akan terhibur dengan pemandangan visual berupa pohon pinus di sisi anda, serangkaian vegetasi tropis yang dihiasi dengan rumah semi permanen dan wajah tertegun dari anak-anak lokal ketika kendaraan anda melewati mereka.



Pemandangan Danau Laut Tawar

Takengon memiliki Danau Laut Tawar dimana di dalamnya terdapat ikan deupik dan hanya hidup di Takengon. Inilah salah satu objek wisata yang istimewa di Kabupaten Aceh Tengah. Selain pemandangannya yang indah, keistimewaan lain Danau Laut Tawar adalah airnya yang tidak asin dan adanya empat gua yang mengelilingi danau tersebut. Danau tersebut luasnya hampir seperti laut, karena itu masyarakat menyebutnya Danau Laut Tawar. Dua bukit yang mengapit danau ini, semakin memperlihatkan keindahan danau. Penyatuan perairan dan dataran memberi banyak sumber penghidupan bagi masyarakat, terutama di sekitar dataran tinggi Gayo. Saat ini, di Danau Laut Tawar terdapat kapal motor yang dapat membawa Anda untuk mengelilingi danau. Danau ini sangat alami dan tampak belum banyak disentuh tangan manusia, airnya yang jernih membuat anda dapat melihat terumbu karang dan ikan yang berenang di dalamnya.

Keberadaan Danau Laut Tawar menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Ia merupakan objek wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Danau ini menjadi sumber air yang dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, tetapi juga oleh masyarakat di kabupaten lainnya.

Sumber : disarikan dari [www.indonesia.travel](http://www.indonesia.travel)



### Moment to Remember

#### Selamat Menempuh Hidup Baru

Richard Olbi dengan Lidia Sarmita  
tgl. 13 Juni 2014.



#### Selamat Ulang Tahun

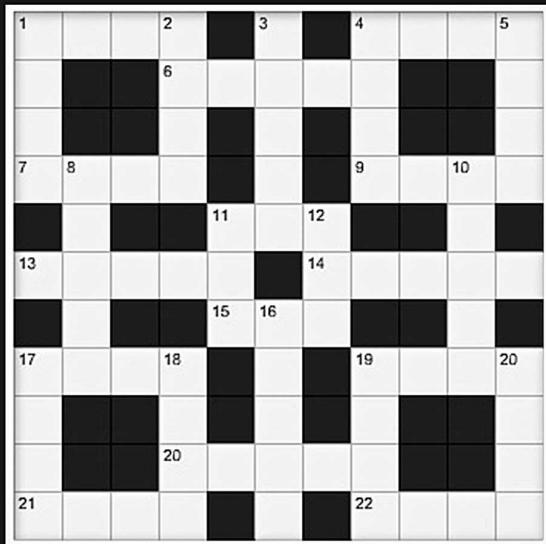
1. Kardi, 28 April 1964
2. Hasiholan Tua, 21 April 1968
3. Ari Endarto, 18 Juni 1969
4. Syafruddin Lubis, 19 April 1971
5. Meirizal, 15 Mei 1976
6. Meri Yanti, 28 Mei 1979
7. Afrida Nursanti, 15 April 1980
8. Andriansyah, 21 Juni 1983
9. Ade Junaedi, 21 Mei 1984
10. Dwi Wahyuningsih, 11 April 1986
11. Chelsiya Arida, 27 April 1986
12. Cut Eka R, 11 Mei 1986
13. Zeno Alea Alex Sander, 08 April 1987
14. Deni Saputra, 15 April 1987
15. Fidia Ishak, 01 April 1990

#### Selamat atas kelahiran

Muhammad Haikal Luthfi ( 13 Juni 2014 )  
Putra Pertama Bapak Heru Luffianto dan Ibu Minarti.



## Quiz!



#### Mendatar

1. Suaminya Shinta (tokoh wayang)
4. Tepat sasaran
6. Paling Baik
7. Siksa
9. Gelar bangsawan Makassar
11. Stempel
13. Hewan khas Australi bisa memanjat
14. Ruangan dalam kapal
15. Radio Nasional kita
17. Garpu nada
19. Planet kita
20. Hewan bersel satu
21. Sarana
22. Langkah seribu

#### Menurun

1. Baca (inggris)
2. Serdadunya westerling
3. Negara beribukota Tripoli
4. Nama bunga
5. Tidak menyetujui
8. Nama benua
10. Duduk mengeram
11. Mobil (inggris)
16. Pameran Produksi Indonesia
17. Cap
19. Omong kosong
20. Yang di tengah

a. Jawaban dikirim ke :

Sub Bagian Hukum dan Humas,  
[buletin.serambi@gmail.com](mailto:buletin.serambi@gmail.com)

b. Jawaban dan pemenang kuis akan diumumkan pada "Buletin Serambi" edisi ketiga Tahun 2014

c. Tersedia hadiah menarik bagi pemenang Quiz yang beruntung

\*) Quiz hanya untuk pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

Pemenang Quiz Buletin Serambi edisi 1 dapat dilihat pada Halaman 4